

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional di suatu negara merupakan cita-cita dari seluruh negara yang ada di dunia. Keberhasilan ini diawali dari adanya keberhasilan pembangunan di tingkat yang paling bawah secara hierarki yaitu pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi suatu hal yang menarik perhatian khususnya di negara Indonesia dikarenakan belum meratanya pembangunan yang terjadi di negara Indonesia sehingga menimbulkan adanya ketimpangan antara kota dan desa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2020 menyatakan bahwa ketimpangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan masih tinggi, di kota tingkat kemiskinan sebesar 7,88% sedangkan di desa mencapai 13,20% (BPS RI, 2020). Data tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan di desa masih belum maksimal dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh di bawah masyarakat kota.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan para pemimpin dunia yang menyepakati rencana aksi global, termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan (Linggarwati et al., 2021). SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 (Linggarwati et al., 2021). Kondisi SDGs di Indonesia termuat dalam Peraturan Presiden Indonesia No. 59/2017 tentang implementasi SDGs di Indonesia yang mengamanatkan Kementerian Nasional Perencanaan Pembangunan Republik

Indonesia untuk menyediakan *roadmap* SDGs Indonesia, selain itu capaian SDGs Indonesia dapat dilihat berdasarkan data (Linggarwati et al., 2021), sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian SDGs Indonesia

TAHUN	CAPAIAN	RANKING DUNIA
2016	54,4%	98
2017	62,9%	100
2018	62,8%	99
2019	64,2%	102
2020	65,3%	101

Sumber:(Linggarwati et al., 2021)

Tabel 1.1 diketahui bahwa Indonesia dalam menerapkan SDGs ditinjau dari ranking dunia mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020, namun apabila ditinjau dari SDGs yang telah diterapkan mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2020. Capaian SDGs Indonesia paling tinggi terjadi di tahun 2020 dengan 65,3%.

SDGs nasional memiliki capaian yang menunjukkan peran desa mencapai 74% dari capaian SDGs nasional yang berarti desa memiliki peran sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian SDGs (Linggarwati et al., 2021). Menanggapi hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) mengeluarkan Permendesa PDPT No.13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (Linggarwati et al., 2021).

SDGs pada tujuan ke 10 (Mengurangi Ketimpangan di Dalam dan Antar Negara) merupakan poin yang sesuai dengan adanya keadaan yang timpang antara pembangunan di desa dan di kota. Diperkuat dengan jumlah desa miskin dan

tertinggal menjadi salah satu indikator persoalan ketimpangan dalam SDGs (Aidha et al., 2019). Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya peran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan yang selaras dengan tujuan SDGs ke 16 yaitu mengenai kedamaian dan keadilan, dan institusi yang tangguh. Makna dari tujuan ke 16 ini bahwa hanya melalui institusi yang tangguh kedamaian dan keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan (Fauziah & Lubis, 2022).

Moseley (2003) dalam (Riauningrum & Cholid, 2018) *Rural development is the process of improving the quality of life and economic well-being of people living in relatively isolated and sparsely populated areas* atau dapat diartikan bahwa pembangunan desa menitikberatkan pada proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial serta memperkuat eksistensi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa dan untuk dapat mengikuti pembangunan desa secara partisipatif (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Pembangunan desa di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah di Indonesia dengan adanya dukungan alokasi dana desa. Kabupaten Semarang yang terbilang memiliki cukup banyak desa masih mengalami adanya kendala dalam pembangunan desa terutama dalam kepercayaan publik. Desa di Kabupaten Semarang Sebagian besar menurut IDM (Indeks Desa Membangun) tergolong kedalam desa berkembang walaupun ada beberapa yang sudah masuk kedalam desa

dengan kategori maju (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020).

Public trust atau kepercayaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai produk yang dihasilkan oleh pemerintah mulai dari kebijakan hingga produk layanan pemerintah. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi akan menghasilkan produk pemerintah yang diterima oleh masyarakat dengan mematuhi segala kebijakan pemerintah (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020).

Public trust sebagai salah satu pendekatan kontemporer yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan, kesukarelaan, dan kepatuhan publik (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020). *Public trust* adalah kata kunci dalam mewujudkan *good governance* karena *public trust* dipandang dapat menumbuhkan motivasi dan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintahannya. *Public trust* didukung oleh teori demokrasi modern bahwa salah satu premis paling mendasar bahwa warga negara dalam suatu negara telah memberikan kepercayaan penuh atas kedaulatan mereka kepada sejumlah institusi birokrasi untuk memutuskan kebijakan pelayanan publik yang terbaik bagi mereka demi kepentingan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial yang mereka sangat dambakan (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020).

Public trust yang kuat akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundangan, mendukung program pemerintah dengan sepenuh hati, percaya dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah sehingga partisipasi publik akan meningkat. Paradigma *new public governance* yang dikemukakan oleh Osborne (2010) dalam (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020) bahwa

kepercayaan publik merupakan bagian penting dalam dimensi jaringan kebijakan dan tata Kelola pemerintahan berbasis jaringan. Teori Ansell dan Gash (2007) dalam (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020) mengatakan bahwa public trust merupakan bagian utama untuk membangun kemitraan dan kolaborasi. Moorman, Deshpande, dan Zaltman (1994:82) dalam (Mubarq, 2020) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga konsep, yaitu:

- (1) Kinerja sesuai dengan harapan, timbulnya kepercayaan masyarakat apabila kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan harapan.
- (2) Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar, kepercayaan masyarakat dibentuk oleh masyarakat sendiri melalui beberapa pengetahuan yang dimiliki terkait dengan citra, reputasi, dan kualitas pelayanan.
- (3) Konsisten, pelayanan dan pembuatan kebijakan mengedepankan kepentingan masyarakat harus berjalan sebagai bukti konsistensi pemerintahan dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Faktanya di lapangan, Indonesia memiliki kepercayaan publik yang terbilang cukup baik, menurut data OECD dalam *Government ad Galnce 2017* tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah mencapai 80% pada tahun 2016, angka ini meningkat 28% dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebesar 52% (M. A. R. Putra, 2017). Walaupun cukup baik negara Indonesia masih mempunyai 20% warga negaranya yang belum menaruh kepercayaannya terhadap pemerintah. Menurut Kim (2010:274) dalam (M. A. R. Putra, 2017) kurangnya kepercayaan publik disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya publik merasa terpolitisasi dan penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara sering untuk kepentingan pribadi,

masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya, menurunnya ekonomi global atau nasional yang disebabkan oleh globalisasi, perkembangan teknologi, skandal politik atau krisis, aparatur negara yang tidak kompeten dan sebab lainnya. Disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kim bahwa kepercayaan publik yang menurun berasal dari kapasitas manajemen publik dan faktor keterlibatan publik dalam pemerintahan. Negara berkembang seperti Indonesia kepercayaan publik dimanifestasikan dengan berbagai aktivitas pemerintah seperti reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, budaya politik, dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah (M. A. R. Putra, 2017).

Keterkaitan antara *public trust*, partisipasi masyarakat dengan pembangunan desa adalah dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat hadir karena adanya *public trust* atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan ahli yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan memiliki arti penting dalam kepercayaan publik (M. A. R. Putra, 2017). Kepercayaan publik hadir menjadikan masyarakat secara *voluntary* untuk berpartisipasi menjalankan dan menaati aturan pemerintah khususnya membantu pemerintah dalam pembangunan desa (M. A. R. Putra, 2017). Pembangunan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari *stakeholder* sehingga apabila peran masyarakat tidak ada dalam pembangunan desa maka desa tidak dapat dikategorikan sebagai desa mandiri maupun desa maju. Data Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyajikan data mengenai Indeks Desa Membangun dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun

2020 yang terdiri dari jumlah desa mandiri di Kabupaten Semarang sebanyak dua desa, jumlah desa maju terdapat 48 desa, jumlah desa berkembang sebanyak 153 desa, jumlah desa tertinggal sebanyak lima desa, dan jumlah BUMDes sebanyak 130 desa (Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Latar belakang peneliti memilih Desa Lerep Kabupaten Semarang adalah untuk mengetahui bagaimana *public trust* dalam pembangunan desa. Namun masih terjadi banyaknya permasalahan pembangunan yang diperkuat dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam pengembangan desa di Kabupaten Semarang (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020), sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan infrastruktur desa yang belum terpenuhi, partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan desa, belum adanya akses keluar bagi desa-desa tertinggal, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, motivasi dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa yang masih kurang, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- 2) Kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di pedesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di pedesaan, serta masih

rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.

- 3) Kapasitas aparatur pemerintahan desa masih rendah, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan, dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi rendah.
- 4) Kantor desa yang sarana prasarannya kurang memadai, masih banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak mempunyai tanah kas desa, serta masih banyaknya desa yang PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah.

Penelitian ini memiliki lokus penelitian di Desa Lerep, hal ini didasarkan karena Desa Lerep merupakan salah satu desa terbesar yang dimiliki oleh Kecamatan Ungaran Barat terlihat dari luas wilayahnya sebesar 682,32 Ha. Desa Lerep sudah menjadi desa wisata sejak 2016 yang tertuang dalam Peraturan Desa Lerep Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Susanawati et al., 2019). Data jumlah wisatawan pada tahun 2017 mencapai 25.242 wisatawan domestik, oleh sebab itu pembangunan di Desa Lerep selalu dilakukan hingga saat ini yang tertuang dalam RPJMDes tahun 2019 – 2015 (Susanawati et al., 2019). Pemilihan lokus penelitian di Desa Lerep juga di dasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan di Desa Lerep yang dapat diuraikan menggunakan sudut pandang dimensi kunci *public trust* diantaranya permasalahan mengenai komitmen yang kuat, kebajikan/ketaatan, kejujuran, kompetensi dan keadilan. Pertama, berkaitan dengan etika administrasi publik melalui observasi langsung ditemukan adanya

permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap *right rules of conduct* (aturan berperilaku yang benar), sebagai contoh adanya ketidakdisiplinan beberapa perangkat desa yang hadir serta pulang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan hari kerja, jam kerja, pakaian dinas, dan cuti bagi aparatur pemerintah desa. Permasalahan ini selaras dengan belum terciptanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Lerep dalam hal tugas dan perannya melayani masyarakat. Etika administrasi publik itu sendiri menurut Pasolong (2007) dalam (Holilah, 2013) adalah sebagai filsafat dan standar (kode etik) atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik berkaitan dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.

Permasalahan yang kedua ditemukan berkaitan dengan kebajikan/ketaatan yaitu penelitian terdahulu mengatakan bahwa dalam pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dengan studi kasus Desa Lerep menemukan kendala secara eksternal salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Ristiana dan Amin Yusuf yang melakukan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Lerep yang menemukan bahwa alasan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa terutama dalam hal BUMDes dikarenakan masyarakat masih belum sepenuhnya percaya untuk menitipkan atau menjual hasil produksi atau olahan yang dihasilkan di toko milik BUMDes yang selaras dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Ristiana & Yusuf,

2020). Kebanyakan masyarakat Desa Lerep lebih memilih untuk memasarkan produk yang dihasilkan sendiri, padahal pemerintah telah memfasilitasi BUMdes yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan menciptakan label yang nantinya dapat meningkatkan nilai jual dari harga produk tersebut (Ristiana & Yusuf, 2020). Dokumen rencana pembangunan juga memperkuat adanya permasalahan pembangunan desa bahwa masih rendahnya fungsi lembaga perekonomian pedesaan serta rendahnya pemahaman masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha, belum optimalnya sistem informasi perencanaan pembangunan yang meliputi fungsi *monitoring* dan evaluasinya, serta masih rendahnya partisipasi pemuda dan peran perempuan dalam pembangunan desa (Kepala Desa Lerep, 2020). Terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun desa mulai berkurang karena kurang adanya kedekatan atau perhatian pemerintah terhadap warganya.

Ketiga, permasalahan berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu kewajiban yang harus ada dalam kehidupan pemerintahan. Berbagai cara mulai dari inovasi modern hingga penghargaan telah dilakukan pemerintah pusat supaya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang beresiko adanya ketidakjujuran dapat termotivasi untuk bekerja secara jujur. Namun, faktanya di Pemerintahan Desa Lerep masih terjadi praktik ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini bukan karena adanya tindak pidana korupsi berupa dana tetapi ketidakjujuran mengenai data masyarakat. Jelasnya bahwa demi tercapainya tertib administrasi kependudukan ada beberapa warga yang belum memiliki NIK sehingga dalam penginputan data mulai dari nama orang tua, tanggal lahir, dll tersebut tidak ditulis secara benar sesuai data

masyarakat melainkan data tersebut diisi seadanya bahkan hanya nama saja yang sesuai dengan identitas warga tersebut. Tindakan ini termasuk kedalam ketidakjujuran karena perangkat desa tidak menanyakan secara lebih jelas kepada beberapa warga yang belum memiliki NIK.

Konsep manajemen, sumber daya manusia diharapkan untuk mampu memanfaatkan dan meningkatkan tenaga seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya, hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia dalam kaitannya masyarakat Desa Lerep diharapkan untuk memanfaatkan dan meningkatkan tenaganya seoptimal mungkin untuk membangun Desa Lerep. Hasil yang didapat oleh penulis di Desa Lerep Kabupaten Semarang diketahui masih terdapat beberapa masalah yang ditemui dalam hal keadilan. Keadilan yang belum optimal dilihat dari dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan dampak positifnya, selain itu belum optimalnya pemberdayaan dikarenakan anggaran dana yang disediakan minim sehingga mengakibatkan dalam pembiayaan BUMDes sendiri memiliki tujuh unit usaha yang anggarannya masih dibagi kembali sehingga mengakibatkan usaha tidak berjalan dengan pesat.

Permasalahan selanjutnya mengenai keadilan bagi masyarakat di Desa Lerep seperti halnya pembangunan desa juga melibatkan adanya kerja sama pihak luar pemerintahan seperti contohnya pihak swasta. Desa Lerep apabila ditinjau dari tujuh unit usaha desa hanya beberapa unit usaha saja yang melakukan kerja sama dengan pihak swasta (Ristiana & Yusuf, 2020). Padahal ketujuh unit usaha tersebut memiliki potensi yang besar untuk pembangunan desa, seperti contohnya unit industri kecil yang masih memasarkan produknya di area Desa Lerep seperti acara

desa, acara BUMDes Gerbang Lentera, dan acara yang dilaksanakan masyarakat Desa Lerep (Ayuni & Hidayat, 2019). Unit ini perlu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal guna menyebarluaskan potensi industri yang dimiliki Desa Lerep.

Permasalahan yang ditemukan selanjutnya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki perangkat desa di Desa Lerep. Kompetensi menurut George Klemp dalam (Muda, 2019) adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif dan/atau kinerja yang unggul. Era modern saat ini semakin dibutuhkan adanya kompetensi khususnya pelayan publik dalam memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehadiran pemerintah. Namun, di Desa Lerep kompetensi perangkat desa hanya terlihat pada jabatan sekretaris desa bahkan sekretaris desa di Desa Lerep seringkali mengerjakan pekerjaan yang bukan tupoksi jabatannya. Hal ini dikarenakan perangkat desa yang lain kurang memahami maksud dari pekerjaan yang diberikan sehingga sekretaris desa seringkali mengambil alih pekerjaan tersebut.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Lerep diperlukan adanya solusi atas permasalahan tersebut, dengan hal itu diperlukannya *public trust* yang optimal dalam terwujudnya pembangunan desa yang optimal pula. Berdasarkan latar belakang di atas, pembangunan desa di Desa Lerep telah dilakukan namun masih terjadi berbagai kendala salah satunya berkaitan dengan kepercayaan publik kepada pemerintah yang ditunjukkan dengan kurangnya keterlibatan serta kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis keadaan *public trust* di Desa Lerep guna menjawab pertanyaan

penelitian mengapa *public trust* di Desa Lerep masih menjadi kendala dalam pembangunan desa di Desa Lerep sehingga penelitian *Public Trust* dalam Pembangunan Desa di Desa Lerep Kabupaten Semarang penting dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah

1. Etika perangkat desa dalam kedisiplinan yang belum optimal
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Lerep.
3. Belum optimalnya ketepatan data administrasi kependudukan di Desa Lerep
4. Belum optimalnya kompetensi perangkat desa di Desa Lerep
5. Belum optimalnya pola kemitraan di Desa Lerep

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana *public trust* dalam pembangunan desa di Desa Lerep Kabupaten Semarang?
2. Apa faktor yang berkontribusi pada *public trust* dalam pembangunan desa di Desa Lerep Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *public trust* dalam pembangunan desa di Desa Lerep Kabupaten Semarang
2. Menganalisis faktor yang berkontribusi pada *public trust* dalam pembangunan desa di Desa Lerep Kabupaten Semarang

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan terkait dengan *public trust* dalam pembangunan desa di Desa Lerep Kabupaten Semarang, maka informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, serta penelitian ini diharapkan akan bermanfaat:

1. Bagi Desa Lerep Kabupaten Semarang
Memberikan informasi dan masukan kepada perangkat desa tentang keadaan di lapangan mengenai *public trust* sehingga dapat melakukan perbaikan peningkatan kinerja dan etika para perangkat desa berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman sehingga dapat menganalisis, membandingkan, dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan nyata dari pengetahuan teoritis yang diperoleh selama bangku perkuliahan.
3. Bagi Lembaga Akademik

Diharapkan mampu memberikan masukan dalam pengembangan ilmu manajemen serta sebagai dasar untuk penelitian yang relevan selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian diperlukan adanya kerangka fikir yang dapat memberikan pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga berpijak pada konsep-konsep yang berhubungan dengan arah penelitian yang akan menjadi landasan teoritis dalam penelitian.

Kerangka teori ini merupakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan untuk digunakan dalam menjelaskan keterkaitan antar variabel sebagai dasar dalam memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah diajukan. Pentingnya teori-teori tersebut menjadikan pada penelitian ini akan menjelaskan beberapa teori yang mendukung dalam penelitian:

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Matriks penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui kebaruan penelitian sehingga tidak terjadi plagiasi. Terdapat 20 penelitian terdahulu yang secara garis besar membahas mengenai *public trust* atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika dianalisis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang dapat diuraikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga dapat disimpulkan adanya persamaan yang hampir mendekati dengan melihat kondisi *public trust* dalam kedekatan pemerintah dengan masyarakatnya. Meski adanya kemiripan dalam menganalisis atau memaknai objek penelitian namun yang akan diteliti

berbeda, berikut merupakan deskripsi secara singkat penelitian terdahulu berdasarkan adanya kesamaan teori yang digunakan sebagai berikut:

H. George Frederickson (1997:46) menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif dan yang selaras pada penelitian ini adalah konsep publik poin kelima bahwa publik sebagai warga negara yaitu warga negara yang dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting. Selain itu, adanya dimensi *trust* yaitu *civil culture* menurut Sztompka (1999) adalah suatu kemampuan politik yang terdistribusi secara luas dengan adanya hubungan timbal balik kepercayaan (mutual trust) pada masyarakat. Adapula *political trust* menurut Blind (2006) adalah kepercayaan yang dinilai dalam bentuk politik yang terjadi Ketika masyarakat memberikan nilai kepada pemerintah dan institusi, pembuat kebijakan, dan para pemimpin politik. Ketiga konsep dan teori para ahli tersebut relevan dengan penelitian ini berkaitan dengan *public trust*.

Ketiga ahli yaitu H. George Frederickson, Sztompka, dan Blind berkaitan dengan konsep publik dan konsep trust ini digunakan pula oleh beberapa penelitian: 1) Peningkatan *Public Trust* dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan (Muhammad Thahrir Haning et al., 2018), 2) Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan (Rian Andhika, 2018), 3) Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya (Ningtyas, 2018), 4) Inovasi Pelayanan Publik Di Kota Kreatif Dalam Meningkatkan

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Hendiyani, 2019), 5) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulung Wetan) (Prayogi, 2019), 6) Kepercayaan Publik (Public Trust) terhadap E-Government: Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar (Sirajuddin & Atrianingsi, 2020). Selain adanya persamaan dengan menggunakan konsep publik dan konsep trust, terdapat perbedaan pada keenam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode kuantitatif dan hanya beberapa penelitian saja yang menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Teori *Public Trust* menurut Park and Blenkinsopp (2011) *defined as a collective assessment of one group over another group that the group will act honestly, be able to fulfil it's commitments and will not harm the other groups* atau dapat diartikan bahwa *public trust* merupakan sebagai penilaian kolektif satu kelompok atas kelompok lain bahwa kelompok tersebut akan bertindak jujur, mampu memenuhi komitmennya dan tidak akan merugikan kelompok lain (Arwati & Latif, 2019). Teori Public Trust menurut Park and Blenkinsopp digunakan pula pada penelitian: 1) Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government: Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan di Kota Makassar (Sirajuddin & Atrianingsi, 2020), 2) *Public Trust and Financial Transparency of E-Government Implementation in Bandung City* (Arwati & Latif, 2019). Selain menggunakan teori *public trust* menurut Park and

Blenkinsopp, persamaan juga terlihat dari metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dimensi kunci *Public Trust* oleh Stoker meliputi komitmen yang kuat, kebajikan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Dimensi kunci ini digunakan pada penelitian dengan judul *Determinants of Public Trust and It's Effect on Taxpayer Compliance Behavior in South Sulawesi Province, Indoneisa* (Mohamad Thahir Haning, Hamzah, et al., 2020). Penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal penggunaan metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Berkaitan dengan faktor yang berkontribusi yaitu kinerja organisasi, daya tanggap, dan akuntabilitas juga terdapat pula pada penelitian: 1) *Public Service Perfomance and Public in Government (an Indonesian Case Study)* (Susanti et al., 2017), 2) *Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices* (Beshi & Kaur, 2020). Selain adanya persamaan adapula perbedaan bahwa dalam melaksanakan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Memperkuat pentingnya penelitian dilakukan maka guna menunjang pendalaman materi dibutuhkan pula penelitian yang dapat memberikan suatu wawasan baru mengenai *public trust* dalam pembangunan desa. Penelitian pertama oleh Fenty Beauty Fasyikhah (2020) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala secara eksternal

dan internal. Selain itu, penelitian kedua oleh Chyntya Iga Ayuni & Zainal Hidayat (2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi BUMDes di Desa lerep adalah partisipasi masyarakat, koordinasi, kerjasama, keterbatasan modal, dan keaktifan pegawai. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan pula bahwa penelitian ini tergolong dalam penelitian yang baru mengenai *public trust* dalam pembangunan desa.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik memiliki peran yang sangat penting karena di dalamnya terdapat suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Nicholas Henry dan David H. Rosenbloom dalam buku Teori Administrasi Publik (Pasolong, 2011) yaitu:

Nicholas Henry (1988) mengemukakan definisi administrasi publik yaitu:

“Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Begitu pula yang dikemukakan oleh David H. Rosenbloom (2005) mengenai definisi administrasi publik yaitu:

“Menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi peraturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau Sebagian”

Pendapat yang dikemukakan diatas, dapat dijelaskan bahwa administrasi publik memiliki peran utama yaitu untuk melayani masyarakat sesuai dengan peran utama fungsi pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif, efisien agar dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik.

1.6.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Pada hakikatnya, perkembangan suatu ilmu dapat dilihat dari perubahan paradigmanya. Hal yang sama dengan ilmu administrasi publik yang mengalami perubahan dari masa ke masa. Terdapat lima paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (Pasolong, 2011), sebagai berikut:

1. Paradigma pertama (Dikotomi Politik dan Administrasi)

Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Lenald D. White yang di dalam bukunya *Politics and Administration* pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut (Keban, 2014). Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya

administrasi negara ini berada (Thoha, 2008). Pada masa ini, dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara (Pasolong, 2011). Fungsi politik mengungkapkan pemerintah memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Memusatkan perhatiannya pada kebijakan/ekspresi dari kehendak rakyat
- b. Fungsi administrasi memberi perhatian dalam pelaksanaan/implementasi dari kehendak tersebut (dijalankan oleh pemerintah (Lembaga eksekutif))

Hasil dari paradigma pertama ini memperkuat paham (nation) perbedaan dari dikotomi politik-administrasi, paham perbedaan ini akan tampak jelas dengan cara menghubungkannya dengan suatu koresponden antara dikotomi nilai (value) dan *practice*. Dengan demikian, segala hal yang diteliti oleh administrasi negara di dalam Lembaga eksekutif bagaimanapun diwarnai dan diabsahkan (legitimized) dengan praktik dan ilmiah (*practice and scientific*) (Thoha, 2008).

2. Paradigma Kedua (Prinsip-prinsip Administrasi)

Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor (Keban, 2014). Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik yang menurut mereka dapat diterapkan di mana

saja atau bersifat universal (Keban, 2014). Sedangkan lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku di mana saja termasuk di organisasi pemerintah (Keban, 2014). Pada masa ini, administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, dan visi. Prinsip administrasi yang terkenal menurut Gulick dan Urwick (Pasolong, 2011) adalah:

- a. *Planning*
- b. *Organization*
- c. *Staffing*
- d. *Directing*
- e. *Coordinating*
- f. *Reporting*
- g. *Budgeting*

3. **Paradigma Ketiga (Administrasi Publik sebagai ilmu politik)**

Morstein-Marx seorang editor buku “Elements of Public Administration” di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini, administrasi

negara bukannya *value free* atau dapat berlaku di mana saja, namun justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu, sehingga terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* di satu pihak dengan anggapan akan *value-laden politic* di pihak lain. Dalam praktik ternyata anggapan kedua yang berlaku, oleh karena itu John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik di mana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Pada masa ini, secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik (Thoha, 2008). Konsekuensi dari paradigma ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial (Thoha, 2008). Dalam masa ini, ada dua perkembangan baru (Pasolong, 2011), yaitu:

- a. Tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat *epistimologis*
- b. Timbulnya studi perbandingan dan pengembangan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi

Morstein-Marx mengatakan bahwa politik dan administrasi sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan tidak realistis apabila terjadi pemisahan.

4. Paradigma keempat (Administrasi Publik sebagai ilmu administrasi)

Paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam (Keban, 2014). Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dsb merupakan fokus dari paradigma ini (Keban, 2014). Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik (Keban, 2014). Semua fokus yang dikembangkan di sini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik, oleh sebab itu lokusnya menjadi tidak jelas (Keban, 2014).

5. Paradigma kelima (Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik),

Administrasi publik telah berkembang menjadi ilmu administrasi publik yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (policy science), dan ekonomi politik. Administrasi publik sebagai suatu bidang kajian yang telah menunjukkan warnanya sendiri (Pasolong,

2011). Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas, fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan pada lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik (Keban, 2014).

6. **Paradigma Keenam (Administrasi Publik sebagai *Governance*)**

Paradigma ini merupakan paradigma terakhir dan berhubungan dengan pemerintahan yang dimulai pada 1990-an. Selama paradigma ini perubahan persepsi pemerintah dan persepsi yang terjadi adanya perubahan dicatat dalam tiga klasifikasi (Pasolong, 2011), yaitu:

- a. Globalisasi, melibatkan perusahaan gabungan multinasional, internet, isu-isu lingkungan seluruh dunia, dan perdagangan internasional.
- b. Redefinisi, melibatkan proses yang sebenarnya oleh pemerintah untuk mendefinisikan kembali posisi pemerintah. Pemerintah bergerak dari kekuasaan dan hierarki menuju kolaborasi dan kemitraan.
- c. Devolusi, termasuk partisipasi warga negara, kelompok warga, kemitraan swasta publik, sektor nirlaba, sektor swasta, otoritas publik, asosiasi pemerintah, dan pemerintah lainnya.

Selama paradigma ini administrasi publik beralih dari mengendalikan warga, upaya menyediakan kebijakan, hukum. Organisasi dan lembaga yang dikendalikan oleh warga, perbedaan kelembagaan antara pemerintah, kelembagaan, masyarakat, swasta,

sektor nirlaba mulai kabur. Pemerintah dalam masa ini pemerintah merestrukturisasi dengan penggunaan teknologi, dan informasi.

Menurut ruang lingkup Administrasi Publik, di dalam Administrasi Publik dibagi dalam dua konsentrasi yakni Kebijakan Publik dan Manajemen Publik. Berikut akan dijelaskan mengenai pembagian konsentrasi Administrasi Publik.

1.6.3 Kebijakan Publik

Sesuai dengan berkembangnya paradigma Administrasi Publik, konsentrasi Administrasi Publik dibagi menjadi dua yaitu Kebijakan Publik dan Manajemen Publik. Menurut Chandler dan Plano (1988:107) di dalam buku Teori Administrasi Publik secara konseptual kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Pasolong, 2011). Bahkan Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2011) beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

William N. Dunn (1994) dalam (Pasolong, 2011) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Thomas R. Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan

publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Pasolong, 2011).

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik (Pasolong, 2011). Sehingga suatu kebijakan publik idealnya adalah kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan untuk sekedar dinyatakan serta kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri (Pasolong, 2011). Dalam buku Teori Administrasi Publik pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk (Pasolong, 2011), yaitu: (1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, (2) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) *Distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi Negara.

1.6.4 Manajemen Publik

Definisi manajemen menurut Stoner & Wankel (1996:4) dalam (Pasolong, 2011) mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kata publik menurut Syafi'e dalam buku Teori Administrasi Publik, mengemukakan bahwa "Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan Tindakan yang benar dan baik berdasarkan norma-norma yang dimiliki." (Pasolong, 2011).

Pada dasarnya manajemen publik yaitu, manajemen instansi pemerintah, Overman dalam Keban (2004:85), mengemukakan bahwa "manajemen publik bukanlah "scientific management" meskipun sangat dipengaruhi oleh "scientific management. Manajemen publik bukanlah "policy analysis", bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi "rational-instrumental pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain." (Pasolong, 2011).

Manajemen publik dapat disimpulkan merupakan studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti proses pengorganisasian, pengarahan sampai dengan pengawasan satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik secara responsif, efektif, dan efisien demi tercapainya kemakmuran masyarakat (Pasolong,

2011). Manajemen Publik terkait dengan fungsi manajemen yang terkandung di dalamnya adalah etika dalam mengoperasionalkan berbagai fungsi manajemen mulai dari proses pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan. Proses berlangsungnya etika administrasi publik dalam manajemen publik dapat digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan memperkuat strategi, nilai, dan norma dalam suatu organisasi.

1.6.5 Etika Administrasi Publik

1.6.5.1 Konsep Etika

Etika menurut Bertens (1997) dalam (Muhafidin & Yadiman, 2019) adalah seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pegangan dari individu atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selaras dengan Darwin (1999) dalam (Yuniningsih, 2017) mengartikan etika sebagai prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh masyarakat dan menuntun individu untuk berhubungan dengan individu lainnya di masyarakat. Masih dengan tokoh yang sama yaitu Darwin juga mengartikan etika birokrasi (administrasi negara) adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi (Yuniningsih, 2017).

Ada pula menurut Hobbes dalam Widodo (2006:48) dalam (Pasolong, 2011) bahwa etika berkaitan dengan *standar* perilaku di antara orang-orang dalam kelompok sosial. Dengan mengacu kepada ketiga tokoh besar ini

menurut Widodo (2001:252) dalam buku Etika Administrasi Publik maka etika mempunyai dua fungsi (Rudiyansyah & Dahlan, 2018), yaitu:

1. Sebagai pedoman, acuan, referensi bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam birokrasi dan sebagai standar penilaian mengenai baik buruknya perilaku birokrasi publik.
2. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi bagi birokrasi yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dinilai efisien, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, *impersonal*, *merytal system*, *responsible*, *accountable*, dan *responsiveness*.

1.6.5.2 Konsep Publik

Publik pada dasarnya berasal dari Bahasa Inggris “public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat (Pasolong, 2011). Menurut Syafi’ie dkk (1999:18) dalam buku Teori Administrasi Publik bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Pasolong, 2011).

Istilah publik secara sosiologi diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial di antara manusia yang hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama (Hahury, 2022). Menurut Syafri (2012:14) dalam buku Etika Administrasi Publik (Telaah Konsep Mewujudkan Birokrasi yang Profesional) mengartikan publik adalah sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau

kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu (Hahury, 2022). Sedangkan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam (Hahury, 2022) mengatakan *a public is a collective noun for a group of individuals tied together by some common kinds of interest and sharing a sense of togetherness* atau dapat diartikan bahwa publik adalah kelompok individu yang terkait oleh kepentingan bersama dan berbagai rasa atas dasar kebersamaan.

1.6.5.3 Etika Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai proses dalam memberikan kewenangan dalam bertindak yang dikenal dengan istilah *discretionary power* atau *freies ermessen*, proses dilakukan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan pelayanan umum serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Hahury, 2022). Oleh sebab itu, dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangan negara, birokrasi publik harus bertindak dengan pertimbangan etis, sementara yang dimaksud etis adalah etika administrasi publik (Hahury, 2022).

Chandler dan Plano (1982) mengartikan *the ethics of public administration is defined as follows: Ethis is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession, or in other words is the rules or standard of management which become a moral direction for public administrators in performing their duties to serve the public* atau dapat diartikan etika adalah aturan atau standar yang mengatur perilaku moral anggota organisasi atau

profesi manajemen atau dengan kata lain adalah aturan atau standar manajemen yang menjadi arahan moral bagi administrator publik dalam menjalankan tugas melayani masyarakat (Nawawi, 2018). Darwin (1999) dalam buku *Etika Administrasi Publik (Telaah Konsep Mewujudkan Birokrasi yang Profesional)* mengartikan etika administrasi adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi (Hahury, 2022). Selanjutnya, dipertegas pula oleh Pasolong (2007) dalam (Hahury, 2022) bahwa etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik) atau *right rules of conduct* (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik.

Beberapa teori etika administrasi publik di atas yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik merupakan tindakan yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tiga hal penting yang menjadi *concern* dalam etika administrasi publik adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan; dimensi normatif dan dimensi reflektif (bagaimana bertindak) menciptakan suatu institusi yang adil; modalitas etika yang menjembatani agar norma moral bisa menjadi suatu tindakan nyata (Yuniningsih, 2017). Etika administrasi publik digunakan untuk mengkomunikasikan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, etika administrasi publik inilah yang dapat memberikan bagaimana meningkatkan *public trust* terhadap pemerintah. Adanya etika administrasi publik menjadi tujuan

terciptanya kepercayaan publik, hal ini juga disampaikan dalam etika administrasi publik yang digunakan sebagai rujukan bagi para birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu termuat dalam *American Society for Administration* (ASPA) yang dikutip oleh Widodo dalam buku *Teori Administrasi Publik* (Pasolong, 2011), sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri
- 2) Rakyat yang berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah dan pada akhirnya bertanggungjawab kepada rakyat
- 3) Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Dalam artian bahwa semua Tindakan birokrasi seharusnya mengacu kepada kepentingan rakyat
- 4) Manajemen yang efektif dan efisien merupakan dasar bagi birokrasi. Penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, dan penyelewengan tidak dapat dibenarkan
- 5) Sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas-asas iktikad baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan
- 6) Perlindungan terhadap kepercayaan publik sangat penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau *favirisme* yang merendahkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi tidak diterima (tidak etis)
- 7) Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi dan

kasih sayang. Birokrasi publik harus menghargai sifat-sifat tersebut secara arif dan bijak untuk melaksanakannya

- 8) Hati Nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan
- 9) Para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang tidak etis tetapi juga mengusahakan hal yang etis melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.

1.6.5.4 Landasan Etika Administrasi

Dibidang pemerintahan dan administrasi landasan etika harus diperlukan sebagai bagian dari hidup kesusilaan yang harus dijalani dalam setiap jenjang jabatan. Landasan dalam etika administrasi (Yuniningsih, 2017), yaitu:

1. Naturalisme

Paham ini memiliki pendapat bahwa sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami yaitu pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori-teori yang sangat *metafisis*.

2. Individualisme

Esensi *individualism* adalah ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah perihal individu. Orang akan memiliki kinerja yang baik dan selalu berbuat yang terbaik bagi dirinya. Namun, sebaliknya juga mengandung dampak negatif dengan kecenderungan bahwa setiap orang akan mementingkan diri sendiri atau bersikap egosentrisme.

3. *Hedonisme*

Berpendapat bahwa menurut kodratnya manusia selalu mengusahakan kenikmatan atau apabila kebutuhan terpenuhi maka individu memiliki kenikmatan sepuas-puasnya. Pandangan *Aristippus* bahwa mencari kesenangan merupakan kodrat manusia.

4. *Eudaemonisme*

Berasal dari kaya Yunani, yaitu demon yang berarti roh pengawal yang baik, kemujuran atau keuntungan. *Eudaemonia* akan memiliki keinsyafan tentang kepuasan yang sempurna secara jasmani dan rohani, sehingga menciptakan suasana bahagia.

5. *Utilitarianisme*

Utilitarianisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat dari suatu perbuatan. *Utilitarianisme* berpendapat bahwa yang benar dibuktikan dengan kegunaannya dan empirisme yang mengajarkan manusia untuk melihat manfaat-manfaat nyata dalam Tindakan bermoral berdasarkan akalinya.

6. *Idealisme*

Paham ini berasal dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberi dorongan kepada manusia untuk melakukan perbuatan.

1.6.6 Public Trust

1.6.6.1 Konsep Publik

H. George Frederickson (1997:46) dalam buku Teori Administrasi Publik menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif (Pasolong, 2011), yaitu:

1. Publik sebagai kelompok kepentingan yang dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat
2. Publik sebagai pemilih yang rasional yaitu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat yaitu kepentingan publik yang diwakili melalui “suara”
4. Publik sebagai konsumen yaitu konsumen yang tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi.
5. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara yang dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Kelima perspektif yang disampaikan oleh H. George Frederickson (1997:46) mengenai konsep publik bahwa dalam penelitian ini

mengartikan publik sesuai dengan poin kelima yaitu publik sebagai warga negara. Poin kelima ini dinilai selaras dengan penelitian ini didasarkan atas pertanyaan penelitian yang hendak mengetahui mengenai bagaimana *public trust* dalam pembangunan desa di Kabupaten Semarang khususnya di Desa Lerep, sehingga *public trust* ini salah satunya dapat terlihat dari partisipasi masyarakat di Desa Lerep dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang juga dianggap sebagai suatu hal yang paling penting. Pada dasarnya pula penyelenggaraan pemerintah tidak dapat berjalan maksimal apabila masyarakat tidak ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

1.6.6.2 Konsep *Trust*

Misztal (1996) menjelaskan bahwa beberapa literatur sosiologi mengonseptualisasikan kepercayaan sebagai kepemilikan individu, kepemilikan hubungan sosial, atau kepemilikan sistem sosial yang dapat diketahui dengan memperhatikan perilaku yang didasarkan pada tindakan-tindakan dan orientasi-orientasi pada tingkat individu (Dulkiah, 2018). *Trust* (kepercayaan) menjadi salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintahan karena *trust* membangkitkan motivasi untuk berperilaku yang dilandasi dengan kejujuran, integritas, sistem prestasi, pemimpin yang membangun budaya kepercayaan, menjaga nilai *demokrasim* efisiensi penegakan hukum, profesionalisme pejabat, dan ideologi layanan publik (Dulkiah, 2018). Ketika pemerintah dapat dipercaya dan memiliki etika

birokrasi yang unggul maka akan melahirkan *public trust* yang kuat dari masyarakat.

Sztompka (1999) dalam (Dulkiah, 2018) membagi *trust* ke dalam lima dimensi. *Pertama*, dimensi *civic culture* di mana *trust* dinyatakan sebagai sikap individu dan *civic culture* mengasumsikan suatu kemampuan politik yang terdistribusi secara luas dengan adanya hubungan timbal balik kepercayaan (mutual trust) pada masyarakat (Dulkiah, 2018). *Kedua* dimensi *civil society* yang mencakup adanya *trust* secara horizontal diantara warga masyarakat dan hubungan vertikal terhadap institusi publik (Dulkiah, 2018). *Ketiga* dimensi *cultural capital* yang merupakan suatu kepercayaan inklusif kelompok yang memiliki status tinggi. *Keempat* adalah dimensi *social capital* yang menekankan adanya kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat (Dulkiah, 2018). *Dan kelima*, dimensi nilai *post materialist* yang terkait dengan komunitas, solidaritas, dan keharmonisan *interpersonal* yang menerapkan pentingnya *trust* (Dulkiah, 2018).

Blind (2006:3) dalam (M. A. R. Putra, 2017) *trust* secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Political trust* (kepercayaan politik)

Kepercayaan politik adalah kepercayaan yang dinilai dalam bentuk politik yang terjadi ketika masyarakat memberikan nilai kepada pemerintah dan institusi, pembuat kebijakan, dan para pemimpin politik. Jika institusi pemerintah, pejabat publik dalam membuat kebijakan dinilai baik oleh masyarakat maka masyarakat memiliki

trust yang tinggi kepada pemerintah. Kepercayaan ini diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena dianggap mampu memenuhi kepentingan warga secara baik.

2) *Social trust* (kepercayaan sosial)

Social trust adalah kepercayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial. Menurut Dwiyanto (2011:360) dalam bukunya mengatakan bahwa kepercayaan sosial menggambarkan ketika warga percaya bahwa tetangganya adalah orang baik yang selalu menjaga harta bendanya selama mereka meninggalkan rumah atau berpergian. Putnam juga mengatakan bahwa dengan adanya partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan saling percaya diantara sesama dapat memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan politik.

Dari kedua konsep *trust* yang dijelaskan menurut ahli yaitu Sztompka (1999) dan Blind (2006) bahwa pada penelitian ini konsep *trust* yang sesuai adalah *civic culture* serta *political trust*. Keduanya memiliki persamaan dimana adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dimana apabila pemerintah dalam melaksanakan serta membuat kebijakan dinilai baik maka mendapatkan *trust* dari masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat akan mendapatkan pelayanan pemerintah yang prima dengan kualitas layanan yang baik pula. Oleh sebab itu, kedua konsep tersebut selaras dengan penelitian ini dikarenakan *trust* yang dimaksud

adalah adanya penilaian yang didapatkan oleh pemerintah dari masyarakat di Desa Lerep.

1.6.6.3 Public Trust

Public Trust menurut Park and Blenkinsopp (2011) dalam (Arwati & Latif, 2019) *defined as a collective assessment of one group over another group that the group will act honestly, be able to fulfil it's commitments and will not harm the other groups* atau dapat diartikan bahwa *public trust* merupakan sebagai penilaian kolektif satu kelompok atas kelompok lain bahwa kelompok tersebut akan bertindak jujur, mampu memenuhi komitmennya dan tidak akan merugikan kelompok lain. Dari teori yang disampaikan oleh Park and Blenkinsopp menitikberatkan bahwa *public trust* dapat muncul apabila satu kelompok atau pemerintah memenuhi komitmennya dan tidak merugikan kelompok lain atau dengan artian tidak merugikan masyarakat. Ketika pemerintah dapat dipercaya dan memiliki etika birokrasi yang unggul, maka akan melahirkan *public trust* yang kuat dari masyarakat.

Piotrwoosky dan Van Rizin (2007) dalam (Tawai, 2020) bahwa *public trust can be defined as the ability to explain what happens in organizations in the public sector through open meetings, granting access to documents, the publication of information through website actively, protection against whistleblowers and even through information leakage illegally* atau diartikan bahwa kepercayaan publik adalah kemampuan untuk menjelaskan

apa yang terjadi dalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan yang terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, dan publikasi informasi. Sedangkan dari teori Straten (2002) dalam (Muhammad Thahrir Haning et al., 2018) kepercayaan publik adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam institusi sosial atau sistem. Dari ketiga teori diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa *public trust* adalah bentuk penilaian kepada pemerintah untuk mampu memenuhi komitmennya, tidak merugikan masyarakat, dan pemberian akses kepada masyarakat.

Secara teoritis terdapat hubungan yang kuat antara kinerja pemerintah dan *trust*, sebagaimana dikutip Van de Walle et all (2008) dalam pemerintah (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020) menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara kecenderungan menurunnya kepercayaan kepada pemerintah dan kinerja. Selain itu, beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan publik kepada pelayanan pemerintah dan kinerja birokrasi publik akan melahirkan partisipasi publik yang semakin baik (Y. lee, 2018; Y. Lee & Schachter, 2019). Dalam *literatur* administrasi publik memberikan perhatian utama pentingnya kepercayaan publik. Paradigma *New Public Governance* (NPG) yang merupakan pernyataan Osborne (2010) bahwa kepercayaan publik merupakan bagian dari *policy network* dan tata Kelola pemerintahan (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020). *Public trust* yang kuat akan mendorong masyarakat lebih patuh terhadap peraturan dan

perundangan yang mendukung program pemerintah dengan sepenuh hati, percaya dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah sehingga partisipasi publik akan meningkat serta kepercayaan publik menjadi hal yang penting dalam kehidupan bernegara (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020)

1.6.6.4 Dimensi *Public Trust*

Dimensi kepercayaan publik dikemukakan oleh para sarjana sosiologi sebagai suatu konsep yang bersifat *multidimensional*. *Multidimensional* ini mencakup beberapa dimensi (M. A. R. Putra, 2017), yaitu:

1) Dimensi Kognisi

Dimaknai sebagai warga akan senantiasa meletakkan kepercayaannya terhadap pemerintah ketika mereka dapat terlibat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya interaksi yang tinggi antar warga dan pemerintah membentuk suatu *cognitive knowledge*. Menurut Berman dan Hardin dalam (M. A. R. Putra, 2017) menyatakan bahwa ketika warga percaya kepada pemerintah dan pejabatnya maka tindakan tersebut merupakan keputusan kognitif. Adanya *cognitive knowledge* yang dimiliki masyarakat maka pemerintah dan pejabat akan semakin diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

2) Dimensi Afeksi

Pada dimensi ini kepercayaan publik dapat dideskripsikan melalui adanya hubungan emosional warga dengan pemerintah dan para

pejabat. Semakin intensif hubungan masyarakat dengan pemerintah maka masyarakat memiliki *emotional attachment* dengan pemerintah dan kebijakannya. Hubungan tersebut akan senantiasa terjaga apabila masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan. Sehingga dengan adanya perlakuan tersebut maka tingkat kognisi dan afeksi kepercayaan publik semakin kuat.

3) Dimensi Perilaku

Mendeskripsikan bahwa kepercayaan publik merujuk pada penilaian warga tentang perilaku pemerintah dan para pejabatnya. Penilaian warga terhadap pemerintah dan para pejabatnya mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Kepedulian pemerintah dan para pejabatnya dalam memenuhi kebutuhan warga
- b. Kemampuan pemerintah dan para pejabatnya dalam mengelola kepentingan warga
- c. Komitmen pemerintah dan para pejabatnya dalam memenuhi janji

Stoker memandang bahwa elemen kunci untuk meningkatkan *public trust* kepada pemerintah bahwa dalam desain kebijakan dan implementasi memerlukan dukungan, keterlibatan, dan partisipasi publik (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020). Untuk meningkatkan *public trust* kepada pemerintah ada beberapa dimensi kunci yang perlu dilakukan pemerintah (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020):

1. Komitmen yang kuat

Komitmen yang kuat adalah perilaku yang ditunjukkan dalam hubungan *interpersonal* dan institusi serta masyarakat yang dilayani. Perilaku pejabat publik ditandai dengan penerapan perilaku berkeadilan prosedur pola layanan publik, kompetensi, kejujuran, etika, dan perilaku yang dilandasi norma dan kaidah berperilaku. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah dapat menggunakan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk menyediakan sumber daya.

2. Kebajikan/ketaatan

Kebajikan adalah tingkatan kepercayaan yang dimiliki seseorang (*trustee*) percaya bahwa orang lain bersungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik sesuai harapan orang lain tanpa adanya motif untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Pada dasarnya masyarakat akan patuh dan taat terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, sepanjang masyarakat dapat merasakan bahwa pemerintah secara utuh memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya melalui kewenangan yang dimiliki.

3. Kejujuran

Hasil penelitian tentang kepercayaan publik merekomendasikan agar perilaku jujur birokrat dan para pegawai instansi pemerintah sebagai variabel kunci yang mempengaruhi kepercayaan publik. Kepercayaan kepada pemerintah dapat diakibatkan oleh perilaku

pegawai birokrasi yang cenderung mengedepankan kepentingan pribadinya daripada kepentingan sosial. Ketika pejabat birokrasi tidak melaksanakan amanat yang tertuang dalam sistem tata kelola pemerintahan maka akan menyebabkan semakin meningkatkan perilaku individu yang tidak percaya kepada pemerintah. Dengan kata lain, perilaku jujur dan sesuai dengan etika organisasi yang dipandang merupakan elemen kunci dalam menumbuhkan kepercayaan publik.

4. Kompetensi

Kompetensi ditandai oleh dua aspek penting yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas organisasi. Green menjelaskan kompetensi adalah suatu deskripsi kemampuan kerja yang terukur dan keterampilan individu yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu pekerjaan. Untuk membangun *public trust* kompetensi para pejabat dan organisasi publik sangat berperan signifikan.

5. Keadilan

Pada dasarnya integritas pemerintah dapat mendorong untuk memperkuat kepercayaan publik ketika masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menerapkan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang paling utama dalam meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah adalah *fairness*. Pelibatan

kelompok masyarakat diharapkan menumbuhkan hubungan harmonis dan keterbukaan yang berpotensi dapat menghindari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. *Fairness* sebagai elemen kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi dasar utama para pejabat publik untuk memperlakukan warga masyarakat setara dengan lainnya tanpa melihat status sosial individu.

Beberapa dimensi di atas menjelaskan bahwa *public trust* adalah rasa percaya yang hadir dari dalam diri masyarakat kepada pemerintah sehingga timbul rasa untuk berpartisipasi dan menaati segala aturan pemerintah yang ditinjau dari komitmen yang kuat, kebajikan/ketaatan, kompetensi, kejujuran, dan ketaatan.

1.6.6.5 Aspek *Public Trust*

Kepercayaan publik menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara. Ada tiga aspek penting yang disebut sebagai “pressure points” kepercayaan publik kepada pemerintah di mana ada kecenderungan kepercayaan publik kepada pemerintah bisa tinggi atau rendah (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020), yaitu:

- 1) Perhatian yang rendah terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampak terhadap *income* penduduk, lapangan pekerjaan dan persamaan hak di depan hukum
- 2) Kebencian publik yang tidak segera ditangani pemerintah akibat tindakan koruptif pemerintah, penghindaran pajak, kurangnya

regulasi yang mengatur dan mengendalikan persoalan sosial, yaitu pengangguran, lapangan kerja, pengendalian masalah sosial dan pelayanan publik, lemahnya perhatian terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah

- 3) Lemahnya kemampuan atau kapasitas pemerintah untuk mengelola tekanan global dan risiko sosial yang berdampak buruk kepada masyarakat seperti perubahan iklim global, ketegangan geopolitik, terorisme, dan penanganan masalah sosial bagi para pencari suaka pemerintah

1.6.7 Pembangunan Desa

Lewellen, Larrin, dan Kiely dalam buku *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat* teori pembangunan dalam ilmu sosial dibagi menjadi dua paradigma besar yaitu modernisasi dan ketergantungan (Bahua, 2018). Dalam paradigma modernisasi meliputi teori-teori makro mengenai perkembangan ekonomi dan perubahan masyarakat sedangkan teori mikro mengenai kualitas individu yang mendukung proses perubahan (Bahua, 2018). Pada paradigma ketergantungan merangkum teori-teori keterbelakangan (*under-development*), ketergantungan (*dependent development*), dan sistem dunia (*world system theory*) (Bahua, 2018). Siagan menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang memiliki rencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas

dalam rangka pembinaan bangsa (Bahua, 2018). Selaras dengan Siagan, menurut Alexander dan Portes dalam (Bahua, 2018) bahwa pembangunan atau *development* adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti: politik, ekonomi, infrastruktur, pertanahan, Pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang mendefinisikan pembangunan sebagai bentuk perubahan ekonomi, sosial, dan budaya.

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan bagian yang penting dari suatu masyarakat yang tidak dapat terpisahkan dari organisasi pemerintah yang berhubungan dan berhadapan langsung dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan penting dan strategis khususnya tugas dibidang pelayanan publik. Desa dituntut untuk dapat mengelola pengeluaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kemandirian desa dilakukan dengan upaya pembangunan yang merupakan faktor utama penilaian akan kemandirian desa tersebut. kemandirian desa tidak akan berjalan jika tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan kemandirian suatu desa dapat terlaksana dengan baik apabila mendapat dukungan dari masyarakat.

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan. Tjahja Supriatna (2000) dalam (Nirwana, 2017) pembangunan desa adalah pembangunan yang

dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Adisasmita (2006) dalam (Gumolung et al., 2019). pembangunan desa adalah rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawara di desa. Kedua teori pembangunan desa tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh yang melibatkan masyarakat serta pemerintah serta ditetapkan dalam forum musyawara desa. Pembangunan desa di sampaikan oleh Ahmadi (2001) dalam (Gumolung et al., 2019) mengenai mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa terlihat hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Pembangunan Desa di Indonesia telah di atur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan sebagai. “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”/ pembangunan dalam paradigma *governance* bertujuan untuk mewujudkan

interaksi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sedangkan menurut Dwipayana, dkk (2003) secara rinci menyebutkan tujuan pembangunan desa (Humapi et al., 2017), sebagai berikut:

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas desa dalam rangka pengurangan kemiskinan.
2. Tujuan sosial dan budaya, yaitu pemerataan kesejahteraan penduduk desa dan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat di desa.
3. Tujuan demografis, yaitu meningkatkan potensi sumber daya alam dan tingkat pendapatan penduduk per kapita.
4. Tujuan politis, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam menunjang usaha pembangunan serta memanfaatkan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 yang menegaskan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum musrenbangdes yang hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKP (rencana Kerja Pemerintah Desa) dan selanjutnya ditetapkan dalam APBD Desa.

1.7 Operasional Konsep

1.7.6 *Public Trust*

Public trust atau kepercayaan publik dapat di definisikan sebagai rasa percaya yang hadir dari dalam diri masyarakat kepada pemerintah sehingga timbul rasa untuk berpartisipasi dan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. *Public trust* ini erat kaitannya dengan komitmen yang kuat, kebajikan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Di dalam penelitian ini, fenomena penelitian yang akan diamati sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat (*credile commitment*), digunakan oleh para ahli administrasi publik untuk membuktikan kemampuan institusi publik (birokrasi pemerintah) dan seluruh pegawainya mewujudkan institusi yang kredibel dan dipercaya.
2. Kebajikan (*benevolence*), bahwa kepercayaan yang dimiliki seseorang (*trustee*) percaya bahwa orang lain bersungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik sesuai harapan orang lain tanpa adanya motif untuk mengambil keuntungan.
3. Kejujuran (*honesty*), dapat diartikan perilaku jujur (kejujuran) birokrat dan para pegawai instansi pemerintah sebagai variabel kunci yang memengaruhi kepercayaan publik.
4. Kompetensi (*Competency*), pada dasarnya kompetensi meliputi pengetahuan dan keterampilan yang menstimulasi seseorang agar memiliki kapasitas dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan.

5. Keadilan (fairness), sebagai elemen kunci menjadi dasar utama pemerintah untuk memberlakukan warga masyarakat setara dengan lainnya tanpa melihat status sosial individu.

1.7.7 Faktor yang berkontribusi

Faktor yang berkontribusi yaitu faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam *public trust* meliputi kinerja organisasi, daya tanggap, dan akuntabilitas. Fenomena yang akan diamati sebagai berikut:

- 1) Kinerja organisasi, digunakan mengetahui hasil kerja yang dilakukan baik dari individu maupun kelompok dalam menjalankan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Daya tanggap, upaya mengetahui kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuh dan aspirasi masyarakat.
- 3) Akuntabilitas, upaya mengetahui kualitas beserta kinerja dari organisasi publik agar dapat berorientasi pada kepentingan publik yang didasarkan pada individu atau kelompok jabatan bertanggung jawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Tabel 1.2 Fenomena Penelitian

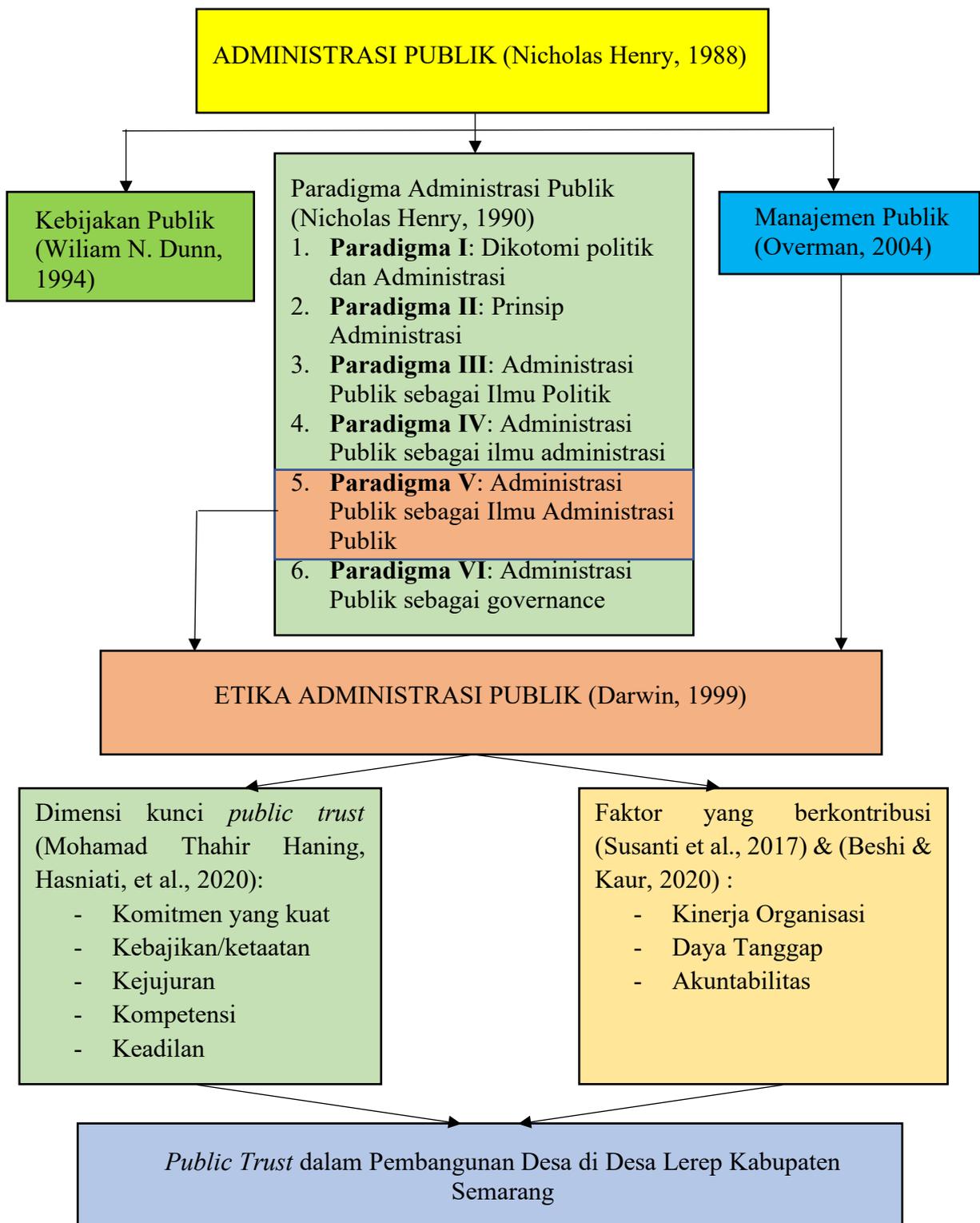
Fenomena	Komponen	Gejala yang diamati	Interview Guide	Informan
<i>Public Trust</i>	<p>Komitmen yang kuat (credile commitment): membuktikan kemampuan institusi publik (birokrasi pemerintah) dan seluruh pegawainya mewujudkan institusi yang kredibel dan dipercaya.</p>	<p>a. Upaya perilaku konsisten (consistent behavior) pemerintah dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam hal ini meningkatkan kepercayaan publik untuk pembangunan desa.</p> <p>b. Bentuk proaktif pemerintah terhadap kepercayaan publik</p> <p>c. Program prioritas pemerintah untuk pembangunan desa di Desa Lerep</p> <p>d. Kendala dalam menumbuhkan <i>public trust</i></p> <p>e. Solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk menghadapi kendala tersebut</p>	<p>1. Bagaimana perilaku konsisten pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk pembangunan desa?</p> <p>2. Bagaimana tindakan proaktif pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat?</p> <p>3. Bagaimana program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa di Desa Lerep?</p> <p>4. Bagaimana kendala dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat?</p> <p>5. Bagaimana solusi yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi kendala tersebut?</p>	<p>1. Kepala/Perangkat Desa Lerep</p> <p>2. Masyarakat Desa Lerep</p> <p>3. Tokoh masyarakat Desa Lerep</p>

	<p>Kebajikan (benevolence): kepercayaan yang dimiliki seseorang (trustee) percaya bahwa orang lain bersungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik sesuai harapan orang lain tanpa adanya motif untuk mengambil keuntungan.</p>	<p>a. Upaya pemerintah untuk memfasilitasi warga masyarakat</p> <p>b. Kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat</p> <p>c. Respons pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat</p> <p>d. Evaluasi program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat</p>	<p>1. Bagaimana upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat?</p> <p>2. Bagaimana kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat?</p> <p>3. Bagaimana respons pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat?</p> <p>4. Bagaimana evaluasi program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat?</p>	
	<p>Kejujuran (honesty): perilaku jujur (kejujuran) birokrat dan para pegawai instansi pemerintah sebagai variabel kunci yang memengaruhi kepercayaan publik.</p>	<p>a. Harapan masyarakat dalam kinerja pemerintah</p> <p>b. Hubungan timbal balik masyarakat dengan pemerintah</p> <p>c. Prosedur penyusunan program dalam hal peningkatan kepercayaan publik</p>	<p>1. Bagaimana harapan masyarakat dalam kinerja pemerintah?</p> <p>2. Bagaimana hubungan timbal balik pemerintah kepada masyarakat?</p> <p>3. Bagaimana prosedur penyusunan program?</p> <p>4. Bagaimana bentuk transparansi yang sudah dilakukan pemerintah?</p>	

		d. Bentuk transparansi yang sudah dilakukan pemerintah		
	Kompetensi (Competency): meliputi pengetahuan dan keterampilan yang menstimulasi seseorang agar memiliki kapasitas dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi b. Kesiapan masyarakat untuk pembangunan desa c. Pembagian tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi pembangunan desa d. Upaya mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi? 2. Bagaimana kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa? 3. Bagaimana pembagian tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi pembangunan desa? 4. Bagaimana upaya mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat? 	
	Keadilan (fairness): elemen kunci menjadi dasar utama pemerintah untuk memberlakukan warga masyarakat setara dengan lainnya tanpa melihat status sosial individu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama yang sudah dilakukan masyarakat dan pemerintah b. Kemudahan akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kerjasama yang sudah dilakukan masyarakat dan pemerintah? 2. Bagaimana kemudahan akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat? 	

		c. Respons pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan sosial	3. Bagaimana respons pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan sosial?	
Faktor yang berkontribusi	Kinerja organisasi: mengetahui hasil kerja yang dilakukan baik dari individu maupun kelompok dalam menjalankan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas hasil program kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai. b. Upaya Pemerintah Desa Lerep dalam memberikan informasi mengenai program kegiatan desa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kualitas hasil program kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai? 2. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Lerep dalam memberikan informasi mengenai program kegiatan desa? 	
	Daya Tanggap: mengetahui kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Pemerintah Desa Lerep untuk mengenali kebutuhan prioritas masyarakat. b. Kesiapan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Lerep. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara untuk mengenali kebutuhan prioritas masyarakat? 2. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Lerep? 	

	<p>Akuntabilitas: mengetahui kualitas beserta kinerja dari organisasi publik agar dapat berorientasi pada kepentingan publik yang didasarkan pada individu atau kelompok jabatan bertanggung jawab pada kegiatan yang dilakukannya.</p>	<p>a. Penyelenggaraan program kegiatan Pemerintahan Desa Lerep dapat dipertanggungjawabkan b. Upaya Pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik</p>	<p>1. Apakah penyelenggaraan program kegiatan Pemerintahan Desa Lerep dapat dipertanggungjawabkan? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam berorientasi pada kepentingan publik?</p>	
--	--	--	--	--



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber: (Nicholas Henry, 1988), (Nicholas Henry, 1990), (Wiliam N. Dunn, 1994), (Overman, 2004), (Darwin, 1999), (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020), (Susanti et al., 2017), (Beshi & Kaur, 2020)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *public trust* guna pembangunan desa di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Pembangunan desa sebagai bentuk usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa yaitu berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pemerintah daerah. Potensi lokal Desa Lerep memiliki sumber daya alam yang melimpah, oleh sebab itu dibutuhkan adanya kepercayaan publik dalam mengolah sumber daya alam yang ada dapat membantu kesejahteraan dan pembangunan Desa Lerep yang tentunya berdampak pula kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lerep. Identifikasi masalah juga telah diuraikan mengenai kondisi kepercayaan publik terhadap pemerintah desa di Desa Lerep yang selalu menjadi kendala di setiap usaha pembangunan desa. Berbagai penelitian juga menyuguhkan hasil penelitian yang kurang lebih sama dengan menyatakan bahwa kepercayaan publik masih menjadi kendala pada setiap kegiatan desa, mulai dari perintis desa wisata, BUMDes, dan pemberdayaan masyarakat yang masing-masing memiliki kendala. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan merujuk pada pelaksanaan *public trust* yang ditinjau dari dimensi kunci dan faktor penghambat *public trust* yang terjadi dalam pembangunan desa di Desa Lerep itu sendiri.

Kerangka berpikir pada penelitian ini merupakan dasar penelitian yang disintesis dari fakta-fakta observasi dan kajian kepustakaan. Uraian kerangka berpikir menjelaskan mengenai hubungan dan keterkaitan antara variabel penelitian atau variabel yang relevan dengan permasalahan diteliti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.8 Argumen Penelitian

1.8.6 Bangunan Teori

Kepercayaan publik merupakan salah satu variabel penting dalam terwujudnya *good governance*. Trust menghasilkan legitimasi publik yang dipergunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah. Satu dasawarsa ini terjadi adanya penurunan kepercayaan publik yang telah menjadi fenomena global. Indikasi adanya krisis kepercayaan publik telah diprediksikan oleh *Eldeman Global* di tahun 2012 dalam *Eldeman Trust Barometer* dengan laporan pertamanya berjudul *Fall of Government* yang menggambarkan potensi keruntuhan rezim dunia. Laporan tahun berikutnya dengan judul *Crisis of Leadership* (2013), *Debate for Change* (2014), *Trust is Essential* (2015), *Growing Inequality of Trust* (2016), dan ditahun 2017 *Eldeman Trust Barometer* menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat mengalami krisis yang utamanya terjadi pada empat institusi yaitu NGO (Non Government Organization), Bisnis, Media, dan pemerintah (M. A. R. Putra, 2017).

Strategi pemulihan kepercayaan publik adalah dengan prinsip tata Kelola pemerintahan partisipatif (*participatory governance*). Pemerintahan partisipatif mengedepankan partisipasi dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik. Menurut Lee J.W (2005) dalam (M. A. R. Putra, 2017) partisipasi dan kepercayaan memiliki hubungan timbal balik, di mana partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan dapat meningkatkan partisipasi. Nawawi (2009) dalam (M. A. R. Putra, 2017) menegaskan bahwa partisipasi

masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam proses demokrasi. Partisipasi juga dapat tercipta dari kepercayaan publik dan partisipasi juga berperan sebagai pilar kepercayaan publik.

1.8.7 Riset Terdahulu

Riset terdahulu yang dilakukan oleh (Fasyikhah, 2020) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (studi kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang) dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan lokus penelitian di Desa Lerep yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pembangunan desa khususnya dalam hal kepariwisataan di Desa Lerep masih ditemukan kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala internal di antaranya pendanaan pembangunan desa dan SDM yang terbatas, sedangkan kendala secara eksternal adalah memperluas target pasar, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Lerep, kurang memadainya sarana dan prasarana pariwisata, pendanaan pembangunan desa, dan keterlibatan masyarakat yang kurang. Peneliti dari riset ini memberikan saran dengan perlu adanya kelompok sadar wisata guna meningkatkan sarana dan prasarana desa, menemukan inovasi, meningkatkan kerja sama, pelatihan dan kesadaran masyarakat, dan memberikan solusi terkait pendanaan.

Riset dengan lokus Desa Lerep juga dilakukan oleh (Ayuni & Hidayat, 2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten

Semarang” menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Lerep memiliki banyak unit yang di antaranya masih sangat minim pelaksanaannya. BUMDes merupakan bentuk usaha pemerintah untuk menunjang pembangunan desa khususnya di Desa Lerep. Pada penelitian ini juga menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi BUMDes di Desa lerep adalah partisipasi masyarakat, koordinasi, kerja sama, keterbatasan modal, dan keaktifan pegawai.

Beberapa penelitian yang dilakukan di Desa Lerep berkaitan dengan pembangunan desa belum ada penelitian yang terfokus pada *public trust*. Namun, penelitian-penelitian di Desa Lerep menyatakan beberapa hal yang menunjukkan bahwa *public trust* atau kepercayaan publik terhadap pemerintah desa Lerep masih kurang seperti halnya belum ada kedekatan antara masyarakat dengan pemerintah Desa Lerep itu sendiri, sehingga pada penelitian-penelitian di atas sebagian besar menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pembangunan desa berasal dari masyarakat itu sendiri.

1.8.8 Urgensi Penelitian

Negara maju di dunia menempatkan kepercayaan publik sebagai aspek yang paling menentukan dalam menciptakan legitimasi publik dan kinerja dalam pemerintahan yang demokratis sehingga nantinya kepercayaan publik dipandang sebagai kapasitas tunggal yang perlu dimiliki organisasi publik untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Public trust* sebagai salah satu pendekatan kontemporer yang dapat diterapkan dalam organisasi publik terutama yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan, kesukarelaan, dan

kepatuhan publik sehingga kepercayaan publik dipandang sebagai isu atau topik utama yang perlu mendapat porsi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, mengembangkan kepedulian dan kepatuhan publik terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020). Urgensi penelitian berkaitan dengan *public trust* juga didasarkan bahwa para ahli memandang bahwa isu kontemporer dalam administrasi publik memasuki abad 21 adalah menjadikan peran kepercayaan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam reformasi birokrasi yang terbukti dari berbagai argumentasi yang menunjukkan bahwa tidak optimalnya reformasi birokrasi karena kepercayaan publik belum mendapatkan prioritas dan perhatian utama bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai elemen kunci yang tidak terpisahkan dalam implementasi kebijakan publik dan kinerja (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, et al., 2020).

Riset terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Semarang telah berusaha untuk melakukan pembangunan desa di seluruh desa yang ada di Kabupaten Semarang. Desa Lerep menjadi salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang dikarenakan Desa Lerep merupakan desa wisata dengan berbagai potensi desa. Namun, faktanya di lapangan dari beberapa riset terdahulu dikatakan bahwa hasil penelitian di Desa Lerep masih mengalami kendala dalam hal pembangunan desa, salah satu faktornya adalah kepercayaan publik masyarakat Desa Lerep. Kepercayaan publik di Desa Lerep yang dimanifestasikan dalam hal partisipasi masyarakat

dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat hadir dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat atau *public trust* terhadap pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Semarang yang secara konsisten melakukan pembangunan desa.

1.9 Metode Penelitian

Pada metode penelitian, peneliti menjelaskan secara umum mengenai tipe penelitian, fokus dan lokus penelitian, pemilihan informan, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan kualitas data/keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti.

1.9.6 Tipe Penelitian

Singarimbun dan Sofyan Efendi (1995:4-5), penelitian digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Tipe penelitian eksploratif, adalah tipe penelitian yang berusaha untuk menelusuri atau menggali ada atau tidaknya suatu masalah atau untuk mengetahui secara mendalam akan suatu masalah tertentu.
2. Tipe penelitian deskriptif, adalah tipe penelitian yang memiliki tujuan menggambarkan suatu gejala tertentu belum disertai hipotesis, namun sudah memiliki analisis walaupun belum begitu mendalam seperti contohnya analisis tabel, analisis persentase, dan sebagainya.
3. Tipe penelitian eksplanatori, adalah tipe penelitian yang sudah memiliki hipotesis, sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui besar dan

kecilnya hubungan dan pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya dalam rangka menguji penelitian yang akan diajukan guna diterima atau ditolak.

Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan sebagainya. Selain itu, penelitian kualitatif juga memiliki beberapa pandangan mendasar, (Sari, 2017) yaitu:

1. Realitas sosial adalah sesuatu yang subjektif dan diinterpretasikan bukan sesuatu yang berada di luar individu-individu.
2. Manusia secara sederhana tidak mengikuti hukum-hukum alam di luar diri, melainkan menciptakan rangkaian makna dalam menjalin kehidupannya
3. Ilmu didasarkan pada pengetahuan sehari-hari, bersifat induktif, ideografis, dan bebas nilai
4. Penelitian bertujuan untuk memahami kehidupan sosial

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menyelidiki suatu prosedur masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan jumlah fakta yang dampak dan sebagaimana adanya. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang ada setelah melakukan pemahaman secara menyeluruh dari objek yang diteliti dan hasil olah pikir

dengan pengukuran dan menarik kesimpulan sesuai dengan kondisi dan waktunya.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti mencoba untuk menjelaskan sejauh mana kepercayaan publik yang telah dilakukan di Desa Lerep dalam pembangunan desa. Kemudian di analisis faktor apa saja yang berkontribusi dalam *public trust* masyarakat Desa Lerep guna membangun desa.

1.9.7 Fokus dan Lokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam suatu penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah.

Fokus penelitian ini adalah sejauh mana *public trust* dalam membangun desa di Desa Lerep. Lokus dalam penelitian ini adalah Desa Lerep. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan Desa Lerep merupakan desa terbesar di wilayah Kecamatan Ungaran Barat yang dijadikan sebagai Desa Wisata.

1.9.8 Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif sangat penting, informan berperan memberikan informasi primer yang dibutuhkan oleh peneliti. Melihat posisi dan peranan informasi sangat sentral, maka untuk menetapkan informan

dibutuhkan seleksi yang tepat. Penelitian ini penentuan informan disesuaikan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta merujuk pada kompetensi yang dimiliki untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dikaji. Informan adalah pihak yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala/perangkat Desa Lerep
- (2) Masyarakat Desa Lerep
- (3) Tokoh masyarakat Desa Lerep

Teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*, dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti sehingga memudahkan peneliti nantinya untuk memperdalam obyek dan situasi sosial yang diteliti. Informan yang telah ditetapkan terkait dengan informasi mengenai *public trust* dalam pembangunan desa. Informan kunci yang dituju adalah Perangkat Desa Lerep yang meliputi kepala desa serta perangkat di bawahnya, Masyarakat Desa Lerep, dan Tokoh Masyarakat Desa Lerep.

1.9.9 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Artinya, data sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung ke lokasi penelitian. Peneliti sebagai

human instrument, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Akan tetapi untuk menunjang kelancaran dalam pengumpulan data, peneliti juga akan menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, catatan bahkan bila perlu menggunakan alat perekam gambar.

1.9.10 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini memiliki dua jenis, yaitu data yang berbentuk teks dan data yang berbentuk kata-kata. Data yang berbentuk teks ini didapatkan dari adanya studi dokumentasi yang diambil dari catatan-catatan, arsip, maupun teori yang terkait diambil dari buku maupun internet. Sedangkan data yang berbentuk kata-kata diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan.

1.9.11 Sumber Data

Moelong (2004) dalam (Sari, 2017) menyatakan bahwa sumber utama data penelitian kualitatif adalah data verbal yang dalam bentuk rangkaian kata-kata atau cerita dan tindakan nyata yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Di dalam hal ini peneliti sebagai pengumpul data primer yang menggunakan panduan wawancara. Data primer didapatkan dari wawancara terhadap informan, yakni Perangkat Desa Lerep, Masyarakat Desa Lerep, dan Tokoh Masyarakat Desa Lerep.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data historis yang sudah terkumpul untuk tujuan penelitian. Sumber data sekunder juga merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dapat diperoleh dari dokumen, buku, data statistik, laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian dan data-data yang telah diolah.

1.9.12 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam proposal adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Lerep. Kemudian, yang menjadi analisis pengamatan adalah sejauh mana *public trust* dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Wawancara dilakukan pada saat informan memiliki waktu senggang di luar jam kerja. Untuk mendapatkan hasil wawancara terekam dengan baik

maka peneliti menggunakan alat bantu wawancara berupa buku catatan, hp (recorder), dan kamera.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya dan menggunakan beberapa alat bantu untuk proses pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, wawancara diarahkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu perangkat Desa Lerep, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Dengan wawancara tersebut, diharapkan dapat menggali data sebanyak-banyaknya dengan berbicara terbuka dan apa saja yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam garis besar tetap terstruktur. Di sini digunakan *interview guide* yang menjaga wawancara agar tetap dalam garis besar yang terstruktur. Dengan keadaan tersebut, maka peneliti sebagai instrumen penelitian dituntut untuk membuat para informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informasi atau data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Setiap bahan tertulis yang pada dasarnya merupakan dokumen sebagai sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan atau bahkan meramalkan. Dokumen yang dimanfaatkan dapat berasal dari mana saja sepanjang berhubungan dengan fokus penelitian dan berupa arsip/laporan pada pihak yang terkait. Merujuk pada penelitian ini, maka data yang dikumpulkan

merupakan dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Desa Lerep. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Selaras dengan Sukmadinata (2009) yang menyatakan bahwa data yang penting perlu disimpan dalam suatu alat penyimpanan data yang disebut *record* (Luthfi, 2019). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan memudahkan peneliti apabila sewaktu-waktu terjadi kehilangan data.

1.9.13 Analisis dan Interpretasi data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data utama dan data pendukung. Data utama (data primer) diperoleh melalui subjek penelitian, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian, sedangkan data pendukung (data sekunder) bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman, gambar, atau foto serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Menurut Sugiyono, analisis data adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan membuat estimasi. Analisis data di dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu analisis deskriptif, analisis eksplanatif, dan analisis inferensi.

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini merupakan Teknik Analisa yang memberikan informasi berbentuk data yang sedang diamati dan tidak memiliki tujuan menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Tujuan dari analisis deskriptif ini hanya menyajikan dan menganalisis data supaya memiliki makna dan dapat dikomunikasikan.

2. Analisis Eksplanatif

Pada analisis ini membahas adanya faktor-faktor apa yang menyebabkan sesuatu peristiwa itu terjadi beserta alasan akan hal tersebut. Dalam analisis ini memiliki dua pandangan yaitu *successionist* dan *generative*. Pertama, pandangan *successionist* memiliki dasar pada ide suatu kejadian di dunia ini terjadi apabila didahului dengan adanya kejadian terdahulu, pandangan ini sering kali didasarkan pada adanya teori atau konsep. Kejadian yang menjadi penyebab dalam pandangan ini disebut variabel independen dan variabel dependen menjadi dampak yang terjadi akibat suatu kejadian. Kedua, pandangan *generative* mengemukakan bahwa pandangan *successionist* hanyalah awal dalam Analisa eksplanatif. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu kejadian, sehingga perlu adanya identifikasi terhadap struktur dan mekanismenya. Teknik statistik yang sering untuk digunakan dalam analisis ini adalah *regresi time series*, regresi panel, regresi logistik, Analisa diskriminan, Analisa kausalitas, Analisa faktor, Analisa kluster, dan regresi model *dummy*.

3. Analisis Inferensi

Analisis ini merupakan analisis untuk menarik sebuah kesimpulan dan hanya dapat dilakukan apabila data yang diambil berasal dari *probability sampling* atau *sampel random*. Dalam proses penarikan kesimpulan, memiliki tiga hal yang dapat dilakukan oleh analisis inferensi, yaitu:

- a. Memperkirakan karakteristik populasi yang didasarkan dari data sampel
- b. Memperkirakan apakah perbedaan antara sampel mungkin terjadi dalam suatu populasi
- c. Memperkirakan apakah pola hubungan yang ditemukan dalam sampel dapat terjadi atau ditemukan dalam populasi.

Peneliti menggunakan tipe analisis deskriptif. Hal ini didasarkan karena analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang hanya memberikan informasi mengenai data yang diamati dan tidak memiliki tujuan untuk menguji suatu hipotesis serta tidak menarik kesimpulan. Tujuan analisis deskriptif juga hanya menyajikan dan menganalisis data sehingga informasi yang didapat dapat memiliki makna dan dapat pula dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran. Analisis dapat dilakukan setelah mendapatkan data yang berasal dari wawancara dan observasi telah terkumpul secara lengkap, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan dicocokkan, dalam mengolah data menggunakan pula output dari *software Atlas.ti*. *Atlas.ti* itu sendiri merupakan perangkat lunak analisis data

kualitatif berbantuan computer yang memfasilitasi analisis data kualitatif yang terorganisir, sistematis, efektif, dan efisien dalam penelitian.

1.9.14 Kualitas Data/Keabsahan Data

Moleong (2010:330) dalam (Arifiyanto, 2014) triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Teknik triangulasi digunakan pada pemeriksaan yang melalui sumber lainnya.

Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah/tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.